

## PENDAMPINGAN PEKAN ASPIRASI SEBAGAI ACUAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Nurnazmi<sup>1\*</sup>, Syahru Ramadan<sup>2</sup>, Nurhasanah<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Prodi Pendidikan Sosiologi, STKIP Bima NTB, Indonesia

<sup>1,2</sup>LSM Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) NTB, Indonesia

<sup>2</sup>Pendamping PKH Kota Bima, Indonesia

[nurnazmi578@gmail.com](mailto:nurnazmi578@gmail.com)<sup>1</sup>, [syahrubimantb@gmail.com](mailto:syahrubimantb@gmail.com)<sup>2</sup>, [nurhasanahsosiologi@gmail.com](mailto:nurhasanahsosiologi@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

**Abstrak:** Pembangunan Desa yang akan dilaksanakan harus kewenangan berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan kewenangan lokal skala desa. Aspek pembangunan desa terdapat dua opsi yakni desa membangun dan membangun desa. Penyerahan aspirasi khusus perempuan dan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam tempo 6 tahun dan RKPDes tertuang setiap tahunnya, dan akan bersinergi dengan visi misi kepala desa. Tujuan, (1) Mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam desa membangun, melalui pekan aspirasi desa; (2) Mengidentifikasi aspirasi berdasarkan bidangnya, dan (3) Mendeksripsikan aspirasi perempuan dalam Musrembangdes khusus perempuan untuk diajukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian fenomenologi. Sumber data terdiri dari relawan yang mengumpulkan aspirasiwarga 24 orang (21 orang laki-laki dan 3 orang perempuan) dan 606 aspirasi warga di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, yang terdiri dari kelompok anak 3%, kelompok perempuan 41%, kelompok disabilitas dan kelompok lansia 4%, dan kelompok masyarakat pada umumnya 52%. Teknik Pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi, jenis wawancara yang digunakan yakni wawancara terstruktur, wawancara langsung atau tidak langsung. Penyampaian aspirasi warga khususnya partisipasi perempuan, sebelumnya belum pernah dilakukan dan melalui program Sekar Desa (Sekolah Anggaran Desa) dapat terealisasi pada setiap tahun. Program Sekar Desa (Sekolah Anggaran Desa) dapat meningkatkan kemampuan soft skill dan hard skill karena dalam soft skill, dapat meningkatkan kemampuan interpersonal (komunikasi, manajemen waktu, motivasi dan kecerdasan emosional) bagi relawan pekan aspirasi; dan peningkatan hard skill para relawan pekan aspirasi dan warga, dalam menganalisis hasil aspirasi dan diimplementasikan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Media penyampaian aspirasi warga terdiri dari warga khususnya perempuan datang langsung ke posko aspirasi; serap aspirasi langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa; warga yang perempuan melakukan pengaduan melalui telepon, sms atau WA; hasil temuan di lapangan atau observasi yang dilakukan oleh tim khusus pekan aspirasi selama 1 Minggu; dan warga melakukan pengaduan melalui email. Aspirasi masyarakat dikelompokkan dalam 5 Bidang yakni (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan jumlah aspirasi 47 aspirasi, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah aspirasi 71 aspirasi, (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan jumlah aspirasi 19 aspirasi, (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah aspirasi 151 aspirasi, dan (5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak dengan jumlah aspirasi 0 aspirasi, Total 288 aspirasi. Sistem evaluasinya bahwa rekapitulasi aspirasi perempuan diimplementasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

**Kata Kunci:** Pendampingan; Pekan Aspirasi; RPJMDesa

**Abstract:** Village development to be carried out must be authorized based on the rights of origin, customs and local authority at the village scale. Aspects of village development there are two options, namely village building and village building. The expression of women's specific aspirations will be stated in the Village Medium-Term Development Plan within 6 years and the RKPDes will be stated annually, and will synergize with the vision and mission of the village head. Objectives, (1) Encouraging women to participate in village development, through village aspiration week; (2) Identifying aspirations based on their field, and (3) Describing women's aspirations in the women's special Musrembangdes to be submitted to the Village Medium-Term Development Plan and contained in the Village Government Work Plan. The research approach uses a qualitative approach, the type of phenomenological research. The data sources consist of volunteers who collect the aspirations of 24 people (21 men and 3 women) and 606 people's aspirations in Dadibou Village, Woha District, Bima Regency, which consists of 3% children's groups, 41% women's groups, disability groups and groups of people with disabilities. elderly 4%, and community groups in general 52%. Data collection techniques are interviews and documentation, the types of interviews used are structured interviews, direct or indirect interviews. Submission of citizens' aspirations, especially women's participation, has never been done before and through the Sekar Desa program (Village Budget School) it can be realized every year. The Sekar Desa Program (Village Budget School) can improve soft skills and hard skills because in soft skills, it can improve interpersonal skills (communication, time management, motivation and emotional intelligence) for aspiration week volunteers; and improving the hard skills of aspiration week volunteers and residents, in analyzing the results of aspirations and implementing them in the Village Medium-Term Development Plan. The media for conveying the aspirations of the citizens consists of residents, especially women, who come directly to the aspiration post; absorb direct aspirations carried out by the Village Consultative Body; female residents make complaints by telephone, sms or WA; findings in the field or observations made by the aspiration week special team for 1 week; and residents make complaints via email. Community aspirations are grouped into 5 fields, namely (1) Village Government Administration with 47 aspirations, (2) Village Development Implementation with 71 aspirations, (3) Village Community Development Sector with 19 aspirations, (4) Village Community Development Sector with 151 aspirations, and (5) Disaster Management, Emergency and Urgent situations with 0 aspirations, a total of 288 aspirations. The evaluation system is that the recapitulation of women's aspirations is implemented in the Village Medium-Term Development Plan and the Village Government Work Plan.

**Keywords:** Accompaniment; Aspiration Week; RPJMDVillage



#### Article History:

Received: 07-03-2022

Revised : 12-05-2022

Accepted: 13-05-2022

Online : 11-06-2022



This is an open access article under the  
CC-BY-SA license

## **A. LATAR BELAKANG**

Perwujudan otonomi desa, yakni penataan kembali pemerintah desa sesuai dengan jiwa semangat otonomi daerah yang luas, maka desa sudah barang tentu mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai basis otonomi daerah atau mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai basis otonomi daerah dan mengupayakan partisipasinya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, kepada masyarakat diberikan kembali haknya untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan susunan asli sesuai dengan hak asal usul, nilai budaya, adat istiadat masyarakat desa setempat.

Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum, mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan berpikir Nomor 22 Tahun 1999, mengapa pemerintah Desa dikembalikan pada susunannya yang asli adalah keanekaragaman dan kekhasan sosial budaya masing-masing desa, yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara normative penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat (Massat, 2013). Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam rangka otonomi desa, artinya hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi sosial budaya setempat (Safriatna, 2019).

Pembangunan desa yang akan dilaksanakan harus kewenangan berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan kewenangan lokal skala desa. Sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Pemnedagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, yang dibagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasayrakan Desa, dan Bidang pemberdayaan masyarakat (Kebudayaan, Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan; Stiftung, Friedrich Ebert; FITRA, Seknas; Desa, dan Sekar, 2016).

Konsep desa membangun dan membangun desa, sama-sama mengarah pada pembangunan desa. Desa membangun merupakan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangan skala desa (subyek hukum pembangunan). Membangun desa merupakan pembangunan oleh Kabupaten atas dasar usulan desa harus mencerminkan keterpaduan antar desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan (lebih dikenal pembangunan kawasan pedesaan) (Akhmad Misbahukhul Hasan; Badiul Hadi, 2018). Undang-Undang Desa memandatkan adanya pembangunan kawasan pedesaan yang pada

dasarnya implementasi dari konsep Membangun Desa. Adapun beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka membangun desa adalah tata ruang kawasan perdesaan disusun secara partisipatif memperhatikan tata ruang desa, kewenangan dan pengarusutamaan gender; Pembangunan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu; penguatan kapasitas masyarakat; penguatan kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan pembangunan infrastruktur antar perdesaan (Kebudayaan, Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan; Stiftung, Friedrich Ebert; FITRA, Seknas; Desa, dan Sekar, 2016).

Pada tahap perumusan dan perencanaan, berbagai elemen masyarakat terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang), mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Tetapi tidak ada jaminan apakah usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam berbagai forum tersebut akan benar-benar diakomodasi ke dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau tidak (The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, 2017). Kemampuan kelompok perempuan basis mengakses dan berpartisipasi aktif dalam musrembang tidak lepas dari penguatan kapasitas. Perempuan ini tidak hanya sekedar menjadi peserta, tetapi sudah ditunjuk menjadi tim delegasi musrembang dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten/ kota. Bahkan sebagai personil kelompok perempuan tersebut ditunjuk menjadi fasilitator musrembang desa dan kecamatan (Misbah Hasan; Widya Kartika; Yenny Sucipto, 2014). Salah satu yang akan dibahas dalam musrembangdes adalah aspirasi-aspirasi yang terkumpul di masyarakat dan akan disesuaikan dengan visi misi kepala dengan dan dituangkan dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) pada kurun waktu 6 tahun, dan RPJMDes akan dituangkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) setiap tahunnya agar apa yang dibutuhkan masyarakat perbidang dapat terealisasi. Akan tetapi yang terjadi di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, belum melaksanakan penjarangan aspirasi warga di setiap dusun, yang dilakukan selama ini hanya musrembangdus dan akan dilanjutkan pada musrembangdes. Sehingga menyebabkan kebutuhan warga belum dapat dicapai dan tentunya tidak akan terealisasi, dengan adanya program Sekar Desa (Sekolah Anggaran Desa), maka dapat memberikan *softskill* dan *hardskill* pada DPB, Pemerintah Desa, Kepala Dusun yang akan menjadi relawan pada “Pekan Aspirasi Masyarakat”. Tujuan pelaksanaan kegiatan antara lain: (1) Mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam desa membangun, melali pekan aspirasi desa; (2) Mengidentifikasi aspirasi berdasarkan bidangnya, dan (3) Mendeksripsikan aspirasi perempuan dalam Musrembangdes khusus perempuan untuk diajukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

## B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Sekolah Anggaran Desa khususnya perempuan yakni kegiatan pelatihan Pembangunan Desa (Membangun Desa > < Desa Membangun) dan melaksanakan pendampingan pekan aspirasi di 5 dusun, yakni Dusun Kawinda, Dusun Ncoha, Dusun Godo, Dusun Sangari dan Dusun Minte Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima NTB.

Profil mitra kegiatan pekan aspirasi masyarakat Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima NTB, yakni kepala desa dan aparatur desa; anggota BPD (Fatmah sebagai BPD terpilih keterwakilan perempuan; Mansyur; Jaidun; Mansyur, S.Pd; Ilham, S.Pd; M.Akbar Tanjung; M.Landa, S.Pd; Suharmaji sebagai BPD terpilih keterwakilan wilayah); Kepala Dusun (Mapa H.Mansyur sebagai Kadus Minte Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima; Iksan, S.Pd sebagai Kadus Sangari Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima; Sudirman, S.Sos sebagai Kadus Ncoha Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima; Hamka H.Usman sebagai Kadus Kawinda Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima; Umar A.Gani sebagai Kadus Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima), total relawan 24 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Warga yang menyampaikan aspirasi sejumlah 606 aspirasi yang terdiri dari kelompok perempuan, kelompok anak, kelompok disabilitas, kelompok lansia dan masyarakat pada umumnya. Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yakni di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima NTB.

Tahapan dalam melaksanakan pengabdian khususnya terkait dengan pekan aspirasi masyarakat, antara lain:

1. Melakukan assessment terkait dengan kesiapan desa yang menjadi dampingan.
2. Melaksanakan kegiatan sekar desa (sekolah anggaran desa) (Akhmad Misbakhul Hasan; Badiul Hadi, 2018) menggunakan modul panduan, seperti terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Anggara Desa

<b>Modul</b>	<b>Materi</b>
I	Implementasi Undang-Undang
II	Peningkatan Kinerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)
III	Konsep Dasar Perencanaan dan Penganggaran Desa
IV	Analisis RPJM Desa dan RKP Desa yang Responsive Gender dan Inklusif
V	Analisis Anggaran Desa

Sumber Data: Laporan Sekar Desa di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun 2019.

3. Melaksanakan pekan aspirasi dengan melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, RT, RW dan tokoh perempuan di desa, menggunakan model pembangunan desa terpadu

inovatif yang pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*eficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*) yang berimbang dalam pembangunan desa (Suharyanto; Arif Safianto, 2012).

Evaluasi dan tolak ukur kegiatan Sekar Desa (Sekolah Anggaran Desa) yakni jumlah partisipasi perempuan dalam membangun Desa dari 606 aspirasi, terdapat 41 % aspirasi bersumber dari perempuan. Hasil aspirasi perempuan akan diusulkan pada RPJM Desa dan dimusrembangkan ditingkat desa (Musrembangdes) untuk menentukan program yang diprioritaskan pada tahun pertama dalam bentuk dokumen RKP Desa.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian pada masyarakat terkait dengan partisipasi perempuan dalam membangun dengan terdiri dari; aspirasi warga dalam membangun desa, bidang-bidang dalam pembangunan desa, dan analisis Partisipasi Perempuan dalam Desa Membangun: Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Adapun tahapan pelaksanaan pekan aspirasi warga, sebagai berikut:

#### 1. Melakukan assesment terkait dengan kesiapan desa yang menjadi dampungan.

Tujuan *assessment* dalam pelaksanaan kegiatan program Desa Melek Anggaran untuk Pembangunan Desa yang inklusif dan responsive gender, perlu adanya pemahaman pemerintah terkait dengan pentingnya alur penyusunan RPJM Desa dan bermuara pada terkumpulnya aspirasi masyarakat. Selain kesiapan pemerintah desa terkait, perlu adanya kesiapan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, kelompok pemuda, kelompok lansia, kelompok anak, tokoh agama dan tokoh adat dalam mendukung terlaksananya kegiatan sekolah anggaran desa.

Capaian pemerintah sebelum dilaksanakan sekolah anggaran desa terkait dengan anggaran yang digunakan dalam pembangunan desa yang inklusif dan responsive gender (dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa, sudah terealisasi atau belum dan berapa persen capaian yang sudah tercapai).

#### 2. Melaksanakan Kegiatan Sekar Desa (Sekolah Anggaran Desa)

Program kegiatan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) terdiri 5 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: (1) Implementasi Undang-Undang, (2) Peningkatan Kinerja BPD, (3) Konsep Dasar Perencanaan dan Penganggaran Desa, (4) Analisis RPJM Desa dan RKP Desa responsive gender dan inklusi, dan (5) Analisis anggaran Desa (Nurnazmi; Syahru Ramadan, 2021), seperti terlihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa)

<b>Tahapan Pelaksanaan Sekar Desa</b>	<b>Materi</b>	<b>Hasil Kegiatan Sekar Desa</b>
Implementasi Undang-Undang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi praktik baik implementasi UU Desa.</li> <li>2. Identifikasi perubahan yang terjadi di desa, baik individu maupun kelembagaan desa.</li> <li>3. Merumuskan tantangan implementasi UU desa kedepan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Implementasi Undang-Undang Desa berdasarkan konsep pembangunan desa (Desa Membangun &gt; &lt; Desa Membangun).</li> <li>5. Implementasi UU Desa berdasarkan azas pengaturan desa (rekognisis, subsidiaritas, keberagaman dan kekeluargaan, musyawarah dan demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan).</li> <li>6. Implementasi UU Desaberdasarkan kewenangan Desa.</li> </ol>
Peningkatan Kinerja BPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan BPD dalam pemerintah desa.</li> <li>2. Penataan kelembagaan BPD.</li> <li>3. Refleksi pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola relasi BPD dengan Kepala sekolah dan LembagaDesa</li> <li>2. Identifikasi kelembagaan BPD.</li> <li>3. Identifikasi Kelembagaan BPD.</li> <li>4. Rencana Kerja Tahunan BPD.</li> <li>5. Identifikasi Perdes yang diterbitkan.</li> <li>6. Pengawasan tahap penyusunan RPJMDesa, RKP Desa, APBDDesa.</li> </ol>
Konsep Dasar dan Perencanaan dan Penganggaran Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep dan pendekatan perencanaan dan penganggaran desa.</li> <li>2. Alur dan aktor perencanaan dan penganggaran desa.</li> <li>3. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran desa serta supra desa.</li> <li>4. Refleksi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran desa.</li> </ol>	Diskusi alur, aktor, dokumen perencanaan dan penganggaran desa.
Analisis RPJM Desa dan RKP Desa responsive gender dan inklusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa yang responsif gender dan inklusif.</li> <li>2. Analisis substansi RPJM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusi tahapan penyusunan RPJM Desa.</li> <li>2. Diskusi tahapan penyusunan RKP Desa.</li> <li>3. Analisis konsistensi</li> </ol>

	Desa dan RKP Desa yang responsif gender dan inklusif.	program RPJMDesa dan RKP Desa.
Analisis anggaran Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur dan rincian APBDesa.</li> <li>2. Praktik analisis APBDesa yang responsif gender dan inklusif. Instrument digunakan untuk mengukur komitmen warga masyarakat, pengurus organisasi sosial warga, dan pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa yang lebih partisipan adalah <i>counter draft</i> rencana pembangunan desa (RPBDDes) yang disusun secara partisipan (Susetiawan; Mulyono; Muh. Yunan Roniardian, 2018), dengan cara memperhatikan besaran anggaran yang tercantum dalam daftar skala prioritas (Deky Aji Suseno; St. Sunarto, 2016).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Tren APBDesa</li> <li>2. Analisis Pendapatan Desa</li> <li>3. Analisis Belanja Desa</li> <li>4. Analisis pembiayaan (surplus-Defisit)</li> <li>5. Analisis kepatuhan APBDesa terhadap Perundang-undangan.</li> </ol>

Sumber: Akhmad Misbakhul Hasan dan Badiul Hadi (2020) dalam (Nurnazmi; Syahrul Ramadan, 2021).

### 3. Melaksanakan Pekan Aspirasi

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan pekan aspirasi, antara lain: (a) Rapat persiapan Pekan Aspirasi masyarakat, (b) pembukaan pekan aspirasi masyarakat, (c) Proses pelaksanaan pekan aspirasi masyarakat, (d) Rekapitulasi hasil aspirasi masyarakat, (e) Musrembangdes khusus perempuan.

#### a. Rapat Persiapan Pekan Aspirasi Masyarakat

Pada tahap perencanaan partisipasi pembangunan desa, partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi dalam menganalisa masalah, yang menuju ke arah rencana tindakan dan pembentukan kelompok lokal baru atau memperkuat yang ada. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan lebih menekankan pengambilan keputusan secara sadar oleh masyarakat atas pilihan-pilihan yang tersedia. Keseluruhan tahapan kegiatan perencanaan pembangunan desa merupakan rangkaian kegiatan untuk membangun dukungan dan kepercayaan kepada masyarakat; membangun relasi yang luas dan kuat dengan masyarakat; mempersiapkan kader-kader lokal dan sebagai upaya membangkitkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kerjasama masyarakat (Herman, 2019).

Strategi pembangunan desa menurut Adisasmita (2006) dalam (Lusi Wulandari, 2017) yaitu kehandalan (*reliable*), dapat diterima

(*acceptable*), pelaksanaan (*implementable*) dan bias dilaksanakan (*workable*). Indikator dalam menentukan partisipasi masyarakat khususnya perempuan, yakni partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan, partisipasi perempuan dalam menciptakan lapangan kerja, dan partisipasi perempuan dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi (Fatmawati; Lukman Hakim; Mappamiring, 2020), indikator untuk partisipasi antara lain partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi (Erwin Fernando Tumbelaka; Michael Mantiri; Sarah Sambiran, 2017).

#### **b. Pembukaan Pekan Aspirasi Masyarakat**

Hasil kesepakatan bersama rapat pelaksanaan Pekan Aspirasi, yakni menyepakati jumlah aspirasi yang akan dijaring, menyepakati lokasi posko/rumah aspirasi, dan tahapan persiapan pekan aspirasi. Jumlah aspirasi untuk 1 relawan sejumlah 30 aspirasi x 21 relawan = 606 aspirasi yang akan terkumpul, baik dijaring melalui BPD, via sms/media sosial, Pemerintah Desa, Kepala Dusun atau warga langsung menyampaikan aspirasi di posko/rumah aspirasi yang telah ditentukan. Lokasi posko/rumah aspirasi terdapat di setiap Dusun yakni Dusun Godo, Dusun Sangari, Dusun Kawinda, Dusun Ncoha dan Dusun Minte.

#### **c. Proses Pelaksanaan Pekan Aspirasi Masyarakat**

Pelaksanaan pekan aspirasi masyarakat dilaksanakan di 4 (empat) dusun yakni dusun Minte, Dusun Sangari, Dusun Ncoha dan Dusun Kawinda Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Proses kegiatan dilaksanakan dengan teknik: *Pertama*, warga Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima akan menyampaikan aspirasi di posko-posko aspirasi yang disediakan di setiap dusun. *Kedua*, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)/ Tokoh masyarakat yang diwakili oleh kepala dusun, tokoh perempuan akan mengunjungi warga di setiap rumahnya. *Ketiga*, aspirasi masyarakat harus terdiri dari kelompok dewasa laki-laki, kelompok perempuan, kelompok remaja atau anak-anak, kelompok marjinal lainnya seperti lansia dan kelompok disabilitas, seperti terlihat pada Gambar 1.



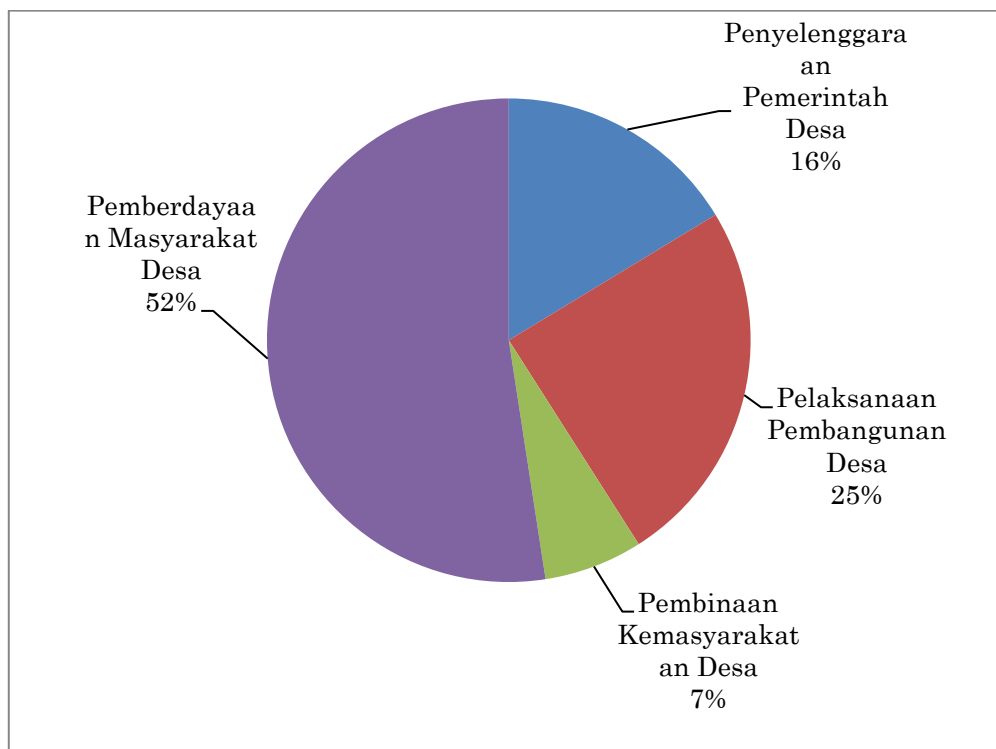


**Gambar 1.** Posko Aspirasi

Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat terdiri dari Dusun Godo, Dusun Sangari, Dusun Kawinda, Dusun Ncoha dan Dusun Minte, yang dimana disaat implementasi pekan aspirasi didirikan posko aspirasi warga di setiap dusunya. Relawam pekan aspirasi warga menjangring aspirasi dengan berbagai cara: (1) Menunggu warga yang menyampaikan aspirasinya diposko terdekat, (2) Menerima aspirasi melaluimedia social seperti WA, facebook, dan instagram, (3) Mengunjungi setiap rumah warga atau ruang publik.

#### **d. Rekapitulasi Hasil Aspirasi Masyarakat**

Berikut adalah rekapitulasi aspirasi perempuan perbidang, seperti terlihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Rekapitulasi Aspirasi Perempuan Perbidang

Pembangunan desa terdapat 4 bidang yang perlu diperhatikan yakni *pertama* bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdapat 47 Aspirasi, *kedua* Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat 71 Aspirasi, *ketiga* Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdapat 19 Aspirasi, *keempat* Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat 151 aspirasi dan *kelima* Penanggulangan Bencana terdapat, Keadaan darurat dan Mendesak tidak ada aspirasi. Jadi total warga khususnya perempuan yang menyampaikan aspirasi yakni 288 aspirasi atau 48 % dari 606 aspirasi.

Aspirasi warga yang perempuan berdasarkan peta wilayah di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdiri dari 5 dusun, yakni Dusun Kawinda, Dusun Ncoha, Dusun Godo, Dusun Sangari dan Dusun Minte. Perempuan yang menyuarakan aspirasinya di Dusun Kawinda terdapat 52 aspirasi atau 18 % dari jumlah aspirasi yang terkumpul. Dusun Ncoha terdapat 78 aspirasi atau 27 % dari jumlah aspirasi yang terkumpul. Dusun Godo terdapat 83 aspirasi atau 29 % dari jumlah aspirasi yang terkumpul. Dusun Sangari terdapat 24 aspirasi atau 8 % dari jumlah aspirasi yang terkumpul. Dusun Minte terdapat 51 aspirasi atau 18 % dari jumlah aspirasi yang terkumpul, seperti terlihat pada Tabel 3.

**Tabel 3** Aspirasi Warga Berdasarkan Wilayah/ Dusun

No.	Bidang	Dusun di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima					Jumlah
		Kawinda	Ncoha	Godo	Sangari	Minte	
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	4	10	17	6	10	47
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	9	21	20	7	14	71
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	7	3	1	3	5	19
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	32	44	45	8	22	151
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak	0	0	0	0	0	0
Total		52	78	83	24	51	288

Sumber Data: Hasil Aspirasi Warga November 2019 di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima

Untuk mewujudkan keadilan dalam menentukan aspirasi warga, maka dibentuk relawan pekan aspirasi berdasarkan pembagian wilayah. Dimana pekan aspirasi ini mengprioritaskan kelompok perempuan, kelompok anak-anak/ remaja, kelompok marjinal lainnya seperti kelompok disabilitas dan kelompok lansia. Aspirasi yang terkumpul berdasarkan partisipasi perempuan terkumpul 288 aspirasi dari 606 aspirasi keseluruhan kelompok, seperti terlihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Perhitungan jumlah aspirasi masyarakat

Mengrekapitulasi jumlah aspirasi yang terkumpul berdasarkan pembagian wilayah/perdusun. Mengidentifikasi aspirasi berdasarkan bidang antara lain: (1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, (2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa, (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, (4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan (5) Bidang penanggulangan bencana terdapat, keadaan darurat dan mendesak tidak ada aspirasi.

#### **e. Musrembangdes Khusus Perempuan**

Tahapan dalam musyawarah desa antara lain pelaksanaan musyawarah yang membahas mengenai permasalahan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, menentukan tujuan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, menentukan pilihan kegiatan, menentukan orang-orang yang akan terlibat dalam kepanitiaan, serta menentukan pilihan kegiatan, serta menentukan biaya/anggaran (Putra Pratama Saputra; Siti Aisyah; Darmanto, 2021).

Indikator partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, antara lain: mengikuti atau menghadiri acara pertemuan atau rapat-rapat, aktif dalam pembicaraan atau diskusi pada acara pertemuan/ rapat, menyampaikan informasi kepada pemerintah desa dan BPD tentang permasalahan pembangunan desa, Menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa dan BPD dalam rangka penyusunan perencanaan program pembangunan desa, menyampaikan, menyampaikan kritikan yang berkenaan dengan penyusunan rencana program pembangunan desa, Terlibat dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah dusun atau musrembangdes, menyampaikan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap rencana program pembangunan desa (Efnika Septia; Pebriyenni, 2018), seperti terlihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Musrembangdes khusus perempuan

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes) khususnya perempuan yang membahas aspirasi 288 dari partisipasi perempuan, akan dibahas perbidang berdasarkan visi misi kepala desa yang akan dituangkan dalam RPJMDes. Aspirasi yang akan diprioritaskan akan direalisasikan pada RKPDesa.

#### **4. Monitoring dan Evaluasi Aspirasi Warga dalam Desa Membangun**

Bidang-bidang dalam pembangunan desa terdiri dari 4 bidang yakni: (1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, (2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa, (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, (4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan (5) Bidang penanggulangan bencana terdapat, keadaan darurat dan mendesak tidak ada aspirasi.

##### **a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Anak-anak yang menyampaikan aspirasi pada pekan aspirasi sebanyak 11 orang atau 23% dari jumlah aspirasi orang dewasa 36 orang atau 77%. Dilihat dari usia produktif yakni usia masyarakat di atas 15 tahun sampai 64 tahun sebanyak 31 aspirasi atau 32% aspirasi yang terjaring. Usia tidak produktif yakni usia masyarakat yang di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun 15 orang atau 32% warga yang menyampaikan aspirasi, dan 1 orang atau 2% tidak memiliki keterangan.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, terdiri dari 5 sub bidang, yakni Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa; Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa; Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan; Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan Pertahanan. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, terdapat beberapa aspirasi antara lain: Penambahan insentif guru ngaji di TPA supaya dapat mengajarkan dan membimbing lebih baik lagi. Insentif guru sukarela dan/atau guru honorer di SDN Dadibou dicairkan kembali untuk kesejahteraan guru tersebut, dan

diperuntukan oleh warga domisili Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Penambahan insentif honor anggota posyandu. Bantuan tunia berupa uang dan sembako khusus para lansia, janda, anak yatim piatu, disabilitas dan masyarakat yang miskin untuk mensejahterakan hidup warganya.

Aspirasi pada sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa, yakni Permohonan baju seragam sekolah dan alat-alat tulis sekolah bagi warganya yang yatim piatu. Beasiswa pendidikan agar minat belajar anak-anak meningkat. Pakaian seragam anggota masjid ta'alm dan seragam group kasidah rabana. Sub Bidang Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, terdiri dari beberapa aspirasi, antara lain: Pembuatan sertifikat rumah, tanah perkarangan, dan tanah sawah secara gratis. Pemerintah Desa sebaiknya mengevaluasi kembali masalah warga yang menerima bantuan PKH lebih baik dan sangat diperuntukan oleh warga miskin yang benar-benar membutuhkannya.

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, antara lain: Pemerintah desa dan struktur pemerintahan di Dusun, untuk mengikuti pembinaan dan peningkatan perangkat pembangunan desa. Kegiatan pembinaan dan peningkatan LPMD, Pendidikan usaha kerja produktif, perpustakaan desa atau sekolah desa. Pembinaan aparatur pemerintah sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan kabid, kasi serta pengawai desa. Kegiatan pendidikan dan latihan di bidang administrasi umum, teknik fungsional sertakegiatan yang bersifat menunjang guna meningkatkan layanan masyarakat. Sub Bidang Pertahanan yakni Pemekaran Dusun Godo dan Dusun Sangari Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima menjadi satu Desa.

#### **b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Bidang Pelaksana Pembangunan Desa terdiri dari beberapa sub bidang, antara lain: pendidikan; Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang; Kawasan Pemukiman; dan Perhubungan, komunikasi dan Informatika, Energy dan Sumber Daya Mineral. Sub Bidang Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan dan membentuk karakter warga, adapun aspirasi yang dijaring antara lain: Perlengkapan pengajinan TPA untuk anak-anak (karpas, lampu, dan Al-Qur'an); Pengadaan dana perlombaan gerak jalan; Membangun gedung (khususnya Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]) sekolah supaya tidak satu atap dengan rumah; dan Membangun taman baca dan sanggar seni.

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang, antara lain: (1) Pemasangan tambahan lampu lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas di cabang Godo untuk menghindari kemacetan, (2)

Pengadaan tempat pemandian jenazah (keranda), (3) Normalisasi saluran pembuangan, (4) Pengadaan fasilitas pendukung di masjid seperti lemari, perlengkapan dapur dan mukenah, (5) Fasilitas umum lapangan bola volley dan sepak bola, (6) Pembangunan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban umum, (7) Pembangunan spal (saluran pembuangan air limbah), (8) Penataan Sumber daya Alam, Penghijauan, lingkungan hidup dan kebersihan, (9) Pembuatan parit/got mulai dari pemukiman warga sampai muara menuju ke kali, (10) Perbaiki jalur-jalur evakuasi, seperti gang, lorong-lorong, (11) Pengadaan Spal (saluran pembuangan air limbah), (12) Memperbaiki sungai, (13) Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), (14) Pembangunan sarana ketertiban umum, (15) Pembangunan prasarana ekonomi, (16) Pengadaan saluran irigasi, (17) Sarana pengendalian banjir di wilayah dusun Ncoha Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, (18) Pembangunan pos polindes dan fasilitas posyandu Dusun Minte Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Bentuk aspirasi yang terjaring dalam Sub Bidang Kawasan Pemukiman, antara lain: Bedah rumah tidak layak huni, Pengadaan jambanisasi Gratis, Perluas lorong di pemukiman dan Pagar permanen dipinggir jalan. Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan Informatika, Energy dan Sumber Daya Mineral, yakni Aspal jalan di tengah kampung; Aspal gang menuju tambak; Pengadaan pengeras suara di masjid; Perbaikan jalan dari Dusun Ncoha menuju Dusun Minte Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima; jembatan di Dusun Minte Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima perlu direhap/diperbaiki; Permohonan listrik Gratis; dan Pembuatan gang baru di Dusun setiap dusun yang membutuhkan.

### **c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Usia produkti adalah usia penduduk yang berusia di atas 15 tahun dan di bawah 64 tahun, yang berposisi memiliki pekerjaan tetap, yang memiliki pekerjaan tidak tetap atau penduduk masih mencari lowongan pekerja. Aspirasi 100% usia produktif atau 19 warga yang menyampaikan aspirasi, berarti usia tidak produktif tidak ada pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri dari sub bidang yakni Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Pemberdayaan dan Keagamaan; Kepemudaan dan Olahraga; dan Kelembagaan Masyarakat. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdapat tiga aspirasi warga yakni Penanggulangan bahaya kebakaran melalui kegiatan keterampilan bagi para anggota masyarakat. Kegiatan atau hajatan warga di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebaiknya tidak

menggunakan undangan untuk menghemat pengeluaran dan diganti dengan menggunakan pengeras suara di masjid/mushollah. Kegiatan pendidikan hukum di kalangan generasi muda, pelajar sekolah tingkat SMP, SMA, dan orang tua murid.

Sub bidang Pemberdayaan dan Keagamaan, penyaringan aspirasi warga terdapat poin yakni Program peningkatan peranan wanita dan menciptakan keluarga bahagia, sehat dan sejahtera. Perlu adanya Da'i dari luar Desa Dadibou yang memberikan ceramah untuk menambah wawasan keilmuan di segala bidang/aspek dapat terorganisir demi kepentingan masyarakat desa. Menghidupkan kembali budaya/tradisi seni marawis di kalangan masyarakat. Bimbingan dan penyuluhan pengentasan anak terlantar, cacat, anak-anak abnormal dan yang melakukan tindakan criminal. Meningkatkan layanan kesehatan terutama posyandu; Pembinaan pelayanan kesejahteraan sosial; Peningkatan kehidupan keagamaan serta tenaga teknik keagamaan. Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga hanya satu aspirasi yakni Pelaksanaan Senam pagi setiap hari Minggu.

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, sub bidang yang banyak diminati oleh warga, terdiri dari: (1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan sosial budaya yang masih rendah, (2) Pembinaan PKK dan Pendidikan Keterampilan Wanita (PKW) yang belum memadai, (3) Pembinaan Karang Taruna dan pembinaan organisasi sosial masyarakat terkait dengan nilai kepahlawanan dan perintis kemerdekaan belum dilaksanakan. (4) Penyuluhan, pendidikan dan latihan kegiatan pengembangan pasca panen dan mutu hasil pertanian serta perluasan masih di bawah standar. (5) Pelatihan untuk petani agar mencocok tanam modern dan mempertimbangkan lingkungan dan pengaruhnya pada masyarakat. (6) Kegiatan pengembangan produksi dan sumber daya perikanan dan pemasarannya (7) Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat belum dilaksanakan.

#### **d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Penyampaian aspirasi berdasarkan umum pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa lebih didominasi oleh usia produktif, yakni umur kisaran 15 tahun ke atas sampai 64 tahun. Usia produktif dari umur 17 tahun, 18 tahun, 21 tahun sampai 38 tahun, 40 tahun sampai 50 tahun, 52 tahun sampai 57 tahun, 59 tahun sampai 62 tahun, dengan jumlah warga yang menyampaikan aspirasi 127 orang atau sebanyak 84 %. Masyarakat yang usia tidak produktif, yaitu di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas. Sesuai dengan tabel 1.4 Rekapitulasi Umur Warga Penyampai Aspirasi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di atas, maka rincian usia non-produktif yakni 12 tahun, 65 tahun, 67 tahun, 68 tahun, 70 tahun, 72 tahun, 73 tahun, 76

tahun, 78 tahun, 80 tahun, 82 tahun, 87 tahun, dengan jumlah warga yang menyampaikan aspirasi sebanyak 23 orang atau sebanyak 15%. Salah satu warga atau 1% yang menyampaikan aspirasi tidak menuliskan tanggal lahir atau umur.

Warga yang berada di umur anak-anak hanya 3 orang atau 2% saja yang menyampaikan aspirasinya, yakni umur 12 tahun, 17 tahun dan 18 tahun. 1 orang atau 1% warga yang menyampaikan aspirasi tidak menuliskan tahun lahir atau umur. Sedangkan umur dewasa dalam menyampaikan aspirasi sejumlah 147 orang atau 97%. Jadi klasifikasi umur berdasarkan usia produktif dan tidak produktif lebih dominan usia produktif yang menyampaikan aspirasi, sedangkan penyampaian aspirasi berdasarkan usia anak-anak dan dewasa lebih dominan dewasa yang menyampaikan aspirasi untuk membangun desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari beberapa sub bidang antara lain: (1) Kelautan dan perikanan, (2) Pertanian dan peternakan, (3) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, (4) Dukungan Penanaman Modal. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari dua bentuk aspirasi yakni Bantuan untuk petani tambak seperti obat-obatan, jarring, pukot dan nener; dan Bantuan empang milik desa yang akan dikelola oleh beberapa kelompok warga yang berprofesi sebagai nelayan sekitaran Dusun Sangari dan Dusun Godo Deda Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Pertanian dan Peternakan, hasil menjaring aspirasi warga terdiri dari: (a) Meningkatkan usaha ternak ayam, (b) Pengadaan obat-obatan untuk tenak kambing, (c) Pengadaan bibit sapi, ayam, kambing, dan bebek untuk beberapa kelompok ternak, (d) Pengadaan bibit bawang, jagung, padi, (e) Pengadaan obat-obatan dan pupuk untuk pertanian, (f) Peminjaman dana di BUMDes untuk para petani untuk memulai bertanam.

Aspirasi pada sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga lebih banyak dan variatif dibandingkan sub bidang lainnya, adapun aspirasi yang di jaring, antara lain: (1) Pengobatan gratis, (2) Permohonan alat bantu berjalan, seperti: kursi roda, tongkat dan kereta berjalan untuk warga yang mengalami disabilitas, (3) Permohonan alat pendengar suara bagi disabilitas yang mengindap tuli, (4) Permohonan kaca mata untuk memperjelas penglihatan, (5) Bantuan pangan dan meningkatkan perekonomian khusus disabilitas, lansia, anak yatim piatu dan fakir miskin, (6) Alat komunikasi/ media komunikasi, (7) Diadakan alat pembuatan kue seperti cetakan kue, alat panggang kue, dan lain-lain untuk membantu perekonomian keluarga, (8) Biaya pernikahan digratiskan bagi yang kurang mampu, (9) Pengadaan alat-alat jahit seperti mesin jahit, mesin necis dan mesin obras guna untuk membantu perekonomian keluarga, (10) Bantuan mesin las-kompresor khusus diperuntukan untuk para pemuda, (11)



Pengadaan grobak untuk jualan, (12) Bantuan beras raskin dan PKH khusus janda, (13) Pengadaan alat perbengkelan dan pelatihan khusus montir, (14) Pengadaan alat-alat masak (seperti danda, panci dan piring) digunakan dalam hajatan keluarga di setiap dusunya dan memasak TMT tidak pinjam pada warga, (15) Bantuan tambahan gizi untuk bayi dan balita, (16) Pengadaan alat-alat marawis dipergunakan oleh ibu-ibu PKK saat kegiatan Majelis Ta'lim, (17) Pengadaan alat-alat olahraga, (18) Pengadaan bor listrik untuk mendukung kegiatan di permebelan.

Dukungan Penanaman Modal bertujuan agar warga dapat mengembangkan atau membangun bisnis dari modal yang kecil, adapun aspirasi yang disampaikan antara lain: (a) Tambah modal Usaha untuk kelompok atau warga penyandang disabilitas, warga yang berstatus janda/duda, guru sukarela/honorar, para remaja dan bagi masyarakat miskin pada umumnya, (b) Modal usaha kerajinan khusus para ibu rumah tangga, (c) Menambah modal usaha bakula dan perkiosan, (d) Bantuan modal usaha KUBE, dan (e) Penambahan usaha modal untuk usaha pengrajin mebel. Sistem evaluasi pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan program Sekar Desa (Sekolah Anggaran Desa) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi perempuan dalam desa membangun terlihat dari aspirasi yang dituangkan dalam lembar pengaduan aspirasi warga yang dilaksanakan selama sepekan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Pembangunan desa mempertimbangkan 4 bidang yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak. Aspirasi yang disampaikan tidak selamanya dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes karena bukan menjadi wewenang desa seperti pemekaran dusun menjadi desa, bronjonisasi kali, pelebaran kali, dan pembuatan jembatan, melainkan kewenangan pemerintah daerah atau pemerintah propinsi bahkan pemerintah pusat. Relawan dalam pekan aspirasi telah mengikuti pelatihan terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan persolan *softskill* dalam hal komunikasi public, pemanfaatan waktu, motivator, agen perubahan, sedangkan kemampuan *hardskill* terletak pada kemampuan menganalisis aspirasi yang diprioritaskan oleh warga dan menganalisis penggunaan anggaran. Saran dari Tim Abdimas semoga ada perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), aspirasi yang dikumpulkan semoga menjadi acuan Peraturan desa atau Peraturan Kepala Desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) NTB, yang simpul jaringan (sijar) dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) bekerjasama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima dalam mendelegasikan timnya terlibat dalam kegiatan Sekolah Anggaran Desa. Terimakasih kami ucapkan kepada JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) dibawah pengelolaan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan artikel dan telah menerbitkan artikel kami di jurnal pengabdian pada masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Misbahukhul Hasan; Badiul Hadi. (2018). *Modul Sekolah Anggaran Desa*. Jakarta: KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.
- Akhmad Misbahukhul Hasan; Badiul Hadi. (2018). *Modul Sekolah Anggaran Desa*. Jakarta: Seknas FITRA dan KOMPAK.
- Kebudayaan, Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan; Stiftung, Friedrich Ebert; FITRA, Seknas; Desa, dan Sekar. (2016). *Lokakarya dan Pelatihan: Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Implementasi UU Desa yang Pro-Poor dan Inklusif melalui Sistem Informasi dan Desa Terintegrasi (SIDEKA)*. Kabupaten Bima-NTB: Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) NTB.
- Massat, H. (2013). *Partisipasi Dan Penguatan Desa: Obsesi Atau Ilusi? : Desa sebagai Basis Partisipasi dan Demokrasi*. Mataram - NTB: Pustaka Konsepsi Nusa.
- Misbah Hasan; Widya Kartika; Yenny Sucipto. (2014). *Peran Masyarakat Sipil dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Daerah: Sintesis Hasil Penelitian di 14 Daerah Program Building Better Budget for Women and The Poor (B3WP)-The Asia Foundation (TAF)*. Jakarta: Lembaga Mitra B3WP (ICJ, KPPA Sulteng, Yasmib Sulselbar, LP2G, Wire-G, Kopel Indonesia, YLP2EM, LPP Bone, Pinus).
- Safriatna, A. (2019). *ADD Membangun Sumber Daya Desa*. Kota Bima-NTB: Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) NTB.
- The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi. (2017). *Membangun Inisiatif Mendorong Perubahan: 10 Inisiatif Pelibatan Organisasi Islam-Ornop dalam Mendorong Good Governance dan Antikemiskinan*. Jawa Timur: Lutfansah Mediatama.
- Deky Aji Suseno; St. Sunarto. (2016). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang Vol.8 No.2 Edisi Juni ISSN: 2252-826*, 136.
- Efnika Septia; Pebriyenni. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Bendung Air Timur. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol.7 (2) Desember*, 132-133.
- Erwin Fernando Tumbelaka; Michael Mantiri; Sarah Sambiran. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Ponompian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow).

*EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No.2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 5.

- Fatmawati; Lukman Hakim; Mappamiring. (2020). Pembangunan Desa Mandiri melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *JPPM: Jurnal of Public Polity and Management e-ISSN 2715-2952 Volume 1 Nomor 1 Mei*, 17.
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *GROSTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1 No.1*, 75-98, 86.
- Lusi Wulandari . (2017). Strategi Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pengandaran. *Moderta: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No.3*, 60.
- Nurnazmi; Syahru Ramadan. (2021). ProgramSekar Desa untuk Memfasilitasi BPD dalam Mengontrol dan Mengevaluasi Anggaran di Masa Pandemi Covid 19. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021* (pp. 1354-1371). Tasikmalaya: Rumah Cemerlang Indonesia (RCI).
- Putra Pratama Saputra; Siti Aisyah; Darmanto. (2021). Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Pemekaran sebagai Perwujudan Demokrasi di Tingkat Lokal (suatu Studi pada Desa Pemekaran di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Jurnal Wacana Politik Vol.6 No.1 Maret*, 79.
- Suharyanto; Arif Safianto. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah . *Jurnal Bina Praja*, 257.
- Susetiawan; Mulyono; Muh. Yunan Roniardian. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. *JPKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat-Indonesia Journal of Community Engagement Vol.4 No.1 September ISSN 2460-9447 (print) ISSN: 2541-5883 (online)*, 177.